

MENPORA DITO ARIOTEDJO

Buktikan Anak Muda Siap Memimpin

JAKARTA (KR) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyampaikan tekadnya untuk membuktikan bahwa anak muda siap memimpin dan membawa Indonesia lebih baik di bidang pemuda dan olahraga di masa depan. Ia akan berusaha merangkul dan mencari seluruh titik temu demi berlangsungnya program-program olahraga dan kepemudaan.

"Di era saya, Insya Allah kita akan mengeluarkan inovasi dan inovatif di dunia kepemudaan dan keolahragaan," ujarnya pada acara serah terima jabatan Menpora dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy selaku Plt Menpora di Wisma Menpora, Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Selasa (4/4). Acara ini juga dihadiri Menpora sebelumnya yakni Zainudin Amali dan Hayono Isman. "Mari kita gunakan 1,5 tahun ini untuk membuktikan kepada Indonesia bahwa generasi muda sudah siap untuk memimpin dan generasi muda bisa mem-

bawa Indonesia lebih baik," imbuh Dito. Dito Ariotedjo juga memohon doa dan dukungan seluruh stakeholder untuk bekerja sama dan bergerak bersama memajukan pemuda dan olahraga Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, dipimpinya Kemenpora oleh pemuda merupakan hal yang baru dan luar biasa. Menurutnya, Dito Ariotedjo sosok pilihan Presiden Joko Widodo yang tepat dan memimpin Kemenpora di sisa periode kedua kepemimpinan Presiden. Apalagi, Muhadjir menyatakan, Kemenpora satu-satunya kementerian yang vitalitasnya sangat tinggi. Karena itu sangat wa-

jar jika dipimpin anak muda yang energik. "Tentu saja ini suatu hal luar biasa karena Kemenpora dipimpin anak muda yang energik, punya pengalaman matang di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Sehingga sesuai dengan janji Bapak Presiden, Kemenpora akan dipimpin oleh anak muda dan sosoknya adalah Mas Dito ini," jelas Muhadjir. Menko PMK menerangkan beberapa tugas yang akan diemban Dito Ariotedjo sebagai Menpora baru. Di bidang kepemudaan, terdapat tugas untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan pemuda. Di bidang keolahragaan, pengembangan sistem talent scouting, mulai dari tingkat paling bawah SD sampai di tingkat desa juga mesti dilakukan. Muhadjir mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden untuk tetap mendampingi Menpora Dito dalam upaya meningkatkan sektor kepemudaan dan keolahragaan yang lebih baik di masa depan. (Ati-f

Sumbangan hal 1

THR Harus

yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan struktural, fungsional atau tunjangan umum lainnya serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50 persen. "Perlu diketahui THR itu gaji dan tunjangan yang melekat 100 persen. Itu yang memang harus dibayarkan," ujar

Amin Purwani. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, besaran THR bagi ASN mengacu pada kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi dalam negeri. Pada 2023 ini kondisi penanganan Covid-19 tetap terkendali, namun disisi lain

pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang tidak pasti. "Kalau untuk THR ASN, kami hanya membayarkan untuk yang ada di lingkungan pemda. Sedangkan untuk dosen, TNI, Polri ada di lembaga masing-masing," ungkapnya. (Ria-f

Sumbangan hal 1

Jangan

sesuai ungkapan apabila ingin kualitas yang bagus maka perlu dana yang lebih besar. Untuk itu perlu diimbangi pula dengan dukungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sangat relevan dengan pendidikan. Demikian antara lain yang mengemukakan dalam Diskusi & Studi Kebijakan 'Educational Institutional Economics: Logical Fallacy of Education Financing in Yogyakarta' di Ruang Seminar Auditorium Dryarkara, Selasa (4/4). Kegiatan menghadirkan enam pembicara dimoderatori Wapemred Kedaulatan Rakyat Rony Sugiantoro ini atas inisiasi PT Trisakti Pilar Persada dan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma (USD) didukung KR selaku media partner. Kasubid Perencanaan Disdikpora DIY R Suci Rohmadi mengatakan, pendanaan pendidikan merupakan variabel dan berperan penting. Mekanisme pendanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemda serta masyarakat berupa pungutan pendidikan, sumbangan dan bantuan alias tidak Pemerintah murni.

"Sayangnya pungutan ini punya konotasi negatif yang seringkali dicap pungutan liar alias pungli, ditambah masyarakat menginginkan biaya pendidikan gratis. Total belanja APBD DIY mencapai Rp 6 triliun, untuk belanja urusan pendidikan sebesar Rp 1,5 triliun atau 26 persen. Alternatif solusinya kebijakan pungutan pendidikan dapat tidak dilaksanakan apabila Pemda memenuhi seluruh kebutuhan operasional biaya pendidikan. Jangan sampai ada sumbangan rasa pungutan," tutur Suci. Wakil Ketua ISEI DIY dan Pengajar FEB UGM Amirullah Setya Hardi menyatakan, perlu kesiapan menyambut program wajib belajar yang baru. Urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar berupa SPM Pendidikan. Staf Pengajar FKIP USD Markus Budiraharjo menyototi aspek sosial budaya terkait pendanaan pendidikan. Masyarakat luas memiliki ekspektasi sekolah itu gratis atau bebas biaya sedangkan kualitas sekolah berkorelasi positif dengan kebutuhan dana yang besar.

Asisten Muda Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY Muhammad Rifki justru mengkritisi adanya pungutan pendidikan terus-menerus yang pada akhirnya menjadi polemik. Menggunakan opsi pungutan ini sangat berisiko khususnya dalam pelayanan terhadap anak didik sehingga harus ada aturan/ regulasi yang jelas. Direktur Utama PT Trisakti Pilar Persada Antonius Budisusila menyatakan, tidak semua daerah mematuhi alokasi anggaran belanja urusan pendidikan yang dipatok setidaknya 20 persen, tetapi DIY termasuk baik karena telah mengucurkan dana belanja pendidikan hingga 26 persen. Jika kualitas pendidikan belum memadai, perlu segera diatasi problematika pendanaannya dan diperjelas regulasinya. Mantan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dosen FEB UAJY Y Sri Susilo menambahkan, dari sisi ekonomi, pendidikan sangatlah penting, salah satunya sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan. (Ira-f

Sumbangan hal 1

APK

Sebagian besar handphone yang diproduksi saat ini menggunakan sistem operasi Android. Android memungkinkan para produsen handphone untuk mengembangkan dan menyesuaikan produk mereka dengan fitur-fitur tertentu seperti kamera, layar, dan aplikasi. Android juga menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi mobile, sehingga para pembangun dapat membuat aplikasi yang kompatibel. APK (Android Package Kit) adalah format file yang digunakan untuk menginstal dan mendistribusikan aplikasi Android. Setiap aplikasi Android yang dibuat atau dikembangkan harus dikemas dalam format file APK sebelum dapat diinstal pada perangkat Android. File APK terdiri dari berbagai jenis file seperti kode program, data, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Setelah diinstal pada perangkat Android, aplikasi akan di-decompress dan diinstal pada sistem. Penting untuk diingat bahwa mengunduh dan memasang file APK dari sumber yang tidak terpercaya dapat membahayakan perangkat Android Anda. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi pengguna apabila menginstal APK dari sum-

ber yang tidak terpercaya adalah adanya malware yang tersembunyi di dalam aplikasi. Kasus kiriman pesan via WhatsApp yang menyertakan link download aplikasi APK yang mengandung malware adalah salah satunya. Malware adalah singkatan dari *malicious software*, yaitu program yang dirancang untuk mencuri data atau merusak sistem. Malware biasanya tersembunyi dalam aplikasi yang tampaknya aman dan sah, sehingga sulit untuk dideteksi oleh pengguna. Malware dapat terinstal pada perangkat Anda melalui link download yang tidak terpercaya atau melalui email phishing. Saat ini, banyak dibicarakan modus permintaan unduh surat undangan pernikahan di media sosial yang berakhir dengan kehilangan tabungan. Ada pula kasus serupa seperti unduh cek foto kiriman paket, cek tagihan PLN, cek premi asuransi, dan cek BPJS yang semuanya meminta pengguna untuk mengklik sesuatu yang memiliki kesamaan dalam bentuk file APK. Untuk melindungi diri dari serangan malware apk, pengguna Android harus selalu berhati-hati saat mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Selain itu, pengguna juga harus memper-

barui sistem operasi mereka secara teratur dan memasang perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan menghapus malware. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diperhatikan beberapa langkah berikut ini: (1) Jangan mengklik link download yang tidak dikenal atau mencurigakan yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email. (2) Pastikan untuk mengunduh aplikasi hanya dari sumber resmi seperti Google Play Store atau Apple App Store. (3) Periksa ulasan dan rating aplikasi sebelum mengunduhnya. (4) Jangan memberikan akses pada aplikasi yang mencurigakan untuk mengakses data pribadi Anda. (4) Jangan menginstal aplikasi yang meminta akses pada fitur perangkat yang tidak relevan dengan fungsinya. Sangatlah penting untuk selalu berhati-hati saat mengunduh aplikasi dan memastikan bahwa sumber unduhan adalah terpercaya. Dengan mengikuti saran-saran di atas, maka dapat meminimalkan risiko menjadi korban dari aplikasi APK yang jahat dan menjaga keamanan perangkat Android kita kedepannya. Berkirahat Sebelum Klik. (Penulis adalah Kepala Pusat Studi Forensika Digital FTI UII)-f

Wapres:

keterampilan, dan lainnya yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Juga memberikan akses permodalan dan bantuan pemasaran bagi warga agar bisa mandiri. Dan hasilnya luar biasa memberikan perubahan bagi ekonomi masyarakat. Ma'ruf Amin mengacungkan jempol sebagai tanda apresiasi atau tanda puas karena program penurunan angka kemiskinan ekstrem bisa dijalankan dengan baik di Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sangat serius menangani kemiskinan ekstrem di Jateng. Sejumlah program baik pusat maupun daerah digabungkan agar progresnya bisa lebih cepat. "Setiap minggu kami evaluasi. Beberapa daerah yang masuk kategori miskin ekstrem, kami dorong agar melakukan percepatan. Mereka diminta melakukan pendataan, berapa RTLH, jamban, air, listrik, ak-

ses pekerjaan atau disabilitas yang ada. Siapa yang sudah dapat bantuan, siapa yang belum dan siapa yang harus dijamin negara tiap bulannya," tutur Ganjar. Ganjar mengatakan, pendataan warga miskin ekstrem sudah berjalan 100 persen. Saat ini intervensi juga sudah dilakukan, hanya tinggal percepatan. Gubernur berharap penurunan angka kemiskinan ekstrem dapat terwujud tiga bulan ke depan. Diakui Ganjar, kendala program penurunan angka kemiskinan ekstrem paling utama anggaran yang terbatas. Meski demikian Pemrov Jateng tidak akan putus asa, karena masih ada Baznas, CSR dan filantropi yang bisa dioptimalkan untuk melakukan percepatan. "Kami genjot agar program ini selesai sesuai target yang ditetapkan Pak Wapres, yakni 2024," pungkasnya. (Bdi)-d

Sumbangan hal 1

Diberhentikan,

Pengaduan yang ia sampaikan juga terkait terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait pemberhentian tersebut. Jadi, ujar Endar, ia melapor ke Dewas KPK untuk menguji apakah memang pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan sudah sesuai kode etik yang berlaku di lembaga antirasuah tersebut. Hal itu, lanjut Endar, menjadi dasar baginya melaporkan hal itu ke Dewas KPK. "Saya ingin menguji secara independen terhadap isi rapat pimpinan yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justu ini saya melihat hal yang tidak wajar untuk saya," tuturnya. Endar mengungkapkan, salah satu poin yang tidak wajar adalah soal lamanya dirinya menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dalam keputusan pemberhentian itu, menurutnya, disebutkan telah menjabat selama tiga tahun. Selain itu ia menyebutkan tentang pertimbangan di SK (surat keputusan) pemberhentian terhadap dirinya. "Itu hanya mempertimbangkan masalah waktu pelaksana tugas, sedangkan waktu pelaksanaan tugas tidak diatur berapa tahun dan lain-lain," jelas Endar. Poin lain ia pertanyakan juga soal KPK yang ngotot memberhentikan dirinya dari jabatan direktur penyelidikan dan memulangkannya ke Korps Bhayangkara. Endar mengungkapkan

surat tugas dirinya sebelum yang tahun ini berakhir tanggal 31 Maret 2023. "Perpanjangan yang dilakukan Bapak Kapolri, surat tugasnya terhitung mulai 29 Maret sampai 31 Maret, kalau nggak salah tahun 2024. Surat tugasnya ada sama saya," tegas Endar. Sebelumnya Cahya Harefa mengatakan, pihaknya telah mengirinkan surat penghadapan kembali kepada Polri pada 30 Maret 2023 dan memberhentikan dengan hormat Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. "Di mana masa tugas Bapak Endar di KPK berakhir 31 Maret 2023," kata Cahya. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kembali menyurati Ketua KPK Firi Bahuri terkait jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK. Surat jawaban itu teregistrasi dengan No B/2725/IV/KEP/2023 yang ditandatangani Listyo Sigit pada Senin, 3 April 2023, berisi keputusan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK. Menkopolkum Mahfud MD mengatakan, soal status Brigjen Polisi Endar Priantoro merupakan hal teknis, sehingga menjadi urusan KPK serta Polri. (Ful)-d

Sumbangan hal 1

Korban

Laporan tersebut didasari atas pesan yang dikirimkan korban melalui WhatsApp kepada anaknya yang lain, yakni SL (adik GE) pada 24 Maret 2023 yang mengabarkan, PO sedang di rumah Mbah Slamet. Selain itu, PO juga berpesan jika sampai hari Minggu, 26 Maret 2023, ia tidak pulang, SL dan GE diminta untuk datang ke rumah Mbah Slamet dengan didampingi aparat kepolisian. Atas dasar laporan GE, petugas Satreskrim Polres Banjarnegara segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan jasad PO terkubur di jalan setapak menuju hutan Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Sabtu (4/4). Berdasarkan hasil pemeriksaan, PO dibunuh oleh Mbah Slamet dengan cara diberi minuman yang telah dicampur potas (potassium sianida). Hal itu dilakukan karena Mbah Slamet kesal ditagih terus-menerus oleh korban. Dalam hal ini, tersangka Mbah Slamet menjanjikan akan melipatgandakan uang sebesar Rp 70 juta yang disetorkan PO menjadi Rp 5 miliar. Pencarian 2 Jenazah Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPPD Banjarnegara, Andri Sulistyo, yang ikut terlibat dalam pencarian korban, menuturkan, awalnya beberapa relawan curiga melihat ada gundukan tanah tampak masih agak gembur. "Setelah digali, ternyata ada dua kerangka mayat. Kedua mayat tinggal tulang. Mungkin sudah lama dibunuh," katanya. Menurut Kapolres AKBP

Hendri Yulianto, meskipun mengaku lupa terhadap nama-nama korban, namun mbah Slamet mengaku masih ingih tempat asal para korban, yaitu Tasikmalaya, Palembang, Yoga dan Jakarta. "Untuk korban asal Tasikmalaya, menurut tersangka ada dua orang," kutip Kapolres. Dari 10 mayat yang ditemukan terdahulu, 9 diantaranya sudah rusak dan ada yang tinggal kerangka. Satu mayat masih bisa dikenali dan diketahui identitasnya, yaitu Paryanto (53), warga Perumahan Cibaraja Selajambe Kecamatan Cisaat Sukabungo Jabar. Diperoleh informasi, Tohari alias mbah Slamet menghabisi para korban satu per satu setelah berulang-kali didesak mereka untuk memenuhi janjinya melipatgandakan uang yang telah mereka setorkan. Tersangka kemudian mengagjak para korban yang datang secara bergantian pergi ke kebun miliknya yang terletak sekitar 2 kilometer dari pemukiman dengan alasan untuk menjalani ritual pengandaan uang. Di tempat itu, korban diberi minuman yang belakangan diketahui dicampur potas. Kepada korban dikatakan, minuman dalam botol bekas air mineral itu harus ditenggak agar tidak mengantuk selama mengikuti ritual. Efek minuman tersebut membuat korban tak berdaya dan kemudian tewas. Tersangka kemudian mengubur mayar mereka pada kedalaman sekitar 1 meter. Kades Balun, Mahbudiono, mengatakan, tersangka jarang bersosialisasi dengan warga. Tentang pekerjaan pelaku, ia mengaku tidak tahu persis. Ia menambahkan, warga selama ini tidak menaruh curiga terhadap Tohari. "Warga tidak curiga, tak terpikir sama sekali kalau ia sejahat itu," ujar Mahbudiono. (Mad)-f



Prakiraan Cuaca Rabu, 5 April 2023						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Steman	☁	☁	☁	☁	23-30	75-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95

Bagaimana sih, Solusi Membangun Citra Koperasi Indonesia



di temukannya organisasi yang berkedok koperasi atau koperasi yang tidak sehat (Sugiharsono, 2009). Kondisi ketidakpercayaan tersebut tentu merugikan citra koperasi di Indonesia yang dikenal sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang diharapkan mampu membangun dan mengembangkan potensi masyarakat untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Oleh sebab itu, masyarakat wajib untuk melestarikan dan mengembangkan koperasi. Wujud daripada mengembangkan koperasi agar lebih maksimal maka diperlukan upaya perbaikan citra koperasi di mata masyarakat Indonesia, hal ini dilakukan agar masyarakat percaya bahwa sistem koperasi mampu menjadikan Indonesia bebas dari kemiskinan. Adapun upaya untuk perbaikan

citra koperasi tersebut bisa dilakukan melalui political will disemua segmen yang ada, baik dalam pemerintah ataupun masyarakat. Political will merupakan upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dan penguatan terhadap pemerintah untuk kemudian mengembangkan sistem koperasi dengan baik dan benar, sehingga diharapkan dengan political will tersebut masyarakat dapat mengetahui seluk beluk koperasi dan pemerintah juga diharapkan berani bertindak tegas terhadap koperasi yang tidak sehat maupun membubarkan organisasi yang berkedok koperasi. Investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem koperasi. Hal itu dikarenakan dengan investasi koperasi bisa berkembang lebih cepat, seperti memperbanyak barang yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Kasus investasi

bodong yang berkedok koperasi masih menjamur dengan modus yang makin beragam. Bahkan menurut Ontoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 investasi bermasalah alias bodong sejak awal 2013 hingga 2014 sebanyak 2.772 kasus, dengan jumlah kerugian yang ditanggung nasabah berkisar 45 Triliun (Ojk.go.id, 2014). Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat merusak citra koprasri, maka dari itu diperlukan political will sebagai upaya mengembalikan citra koprasri di Indonesia. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan membangun citra koperasi salah satunya melalui political will yang kuat sehingga hal tersebut mampu meningkatkan eksistensi dan pengembangan koperasi di Indonesia. Menurut Djatnika (2012) political will adalah kemauan politik dari pemerintah atau para

pengambil kebijakan, misalnya dalam hal ini ialah memberikan kepastian usaha, memberikan perlindungan terhadap koperasi, dan memberikan pendidikan pengkoprasian kepada masyarakat. Political Will Melalui Kepastian Usaha Menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi agar dapat menjadi sektor ekonomi kerakyatan yang sejajar dengan badan usaha milik negara dan usaha swasta dibutuhkan kepastian usaha. Kepastian usaha tersebut seharusnya diatur oleh pemerintah, sehingga dengan aturan pemerintah yang disosialisasikan kepada masyarakat akan berdampak bagi kemajuan koperasi. Political Will Melalui Perlindungan kepada Koperasi Meskipun koperasi di Indonesia berdasarkan Pancasila

dan diamanatkan oleh UUD 1945 akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kebijakan yang pemerintah keluarkan seringkali merugikan kehidupan perkoperasian, hal ini terlihat ketika usaha swasta memperoleh berbagai fasilitas dan keuntungan sedangkan koperasi menjadi terpinggirkan. Sehingga selama ini usaha swasta tampil ke depan sebagai panglima ekonomi Indonesia. Oleh karena itu melalui political will diharapkan pemerintah kembali menegaskan perlindungan kepada koperasi di Indonesia dengan memberikan fasilitas khusus yang dimuat dalam penambahan Undang-undang. Political Will Melalui Pendidikan Pengkoperasian Banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia tak lepas dari lemahnya pengetahuan tentang koperasi yang dimiliki masyarakat, lemahnya pengetahuan terjadi